



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmpstsp.barut@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 421.3/001 /DPMPSTSP/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SMP PGRI MALAWAKEN MENJADI
SMP NEGERI 5 TEWEH BARU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala SMP PGRI Malawaken Nomor : 420.3/489/SMP PGRI/2020 tanggal 2 Maret 2020 Perihal Permohonan Penegerian SMP PGRI Malawaken Kecamatan Teweh Baru;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/382/Pemb-Dikdas/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Persetujuan Penegerian SMP PGRI Malawaken menjadi SMP Negeri 5 Teweh Baru;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah;
- b. bahwa SMP PGRI Malawaken sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMP Negeri yang berdiri sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perubahan status SMP PGRI Malawaken menjadi SMP Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Status SMP PGRI Malawaken menjadi SMP Negeri 5
Teweh Baru.

KEDUA ...

- KEDUA : SMP Negeri 5 Teweh Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan laporan perkembangan pendidikan yang diselenggarakan.
 3. Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 April 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**



HERY JHON SETIAWAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
UNIP. 19671119 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di-Jakarta.
Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara di MuaraTeweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Camat Teweh Baru di Hajak.
8. Korwas SLTP/SLTA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.